

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Peran

Teori peran biasa digunakan dalam dunia pertunjukan, bilamana seseorang tokoh dalam sebuah pertunjukan dapat menjadi seorang tokoh tertentu yang dimana jika ia memerankan sebagai tokoh itu ia diharuskan untuk berperilaku sesuai dengan tokoh tersebut. Kedudukan seorang tokoh dalam sebuah pertunjukan menggambarkan kedudukan seseorang dalam kehidupan nyata (Sarwono, 2015). Peran juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang telah dirangkai dengan perilaku tertentu untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu yang tidak mempunyai perbedaan. Maksudnya pada tingkat atas, menengah ataupun bawah, setiap tingkatan tetap memainkan perannya masing-masing.

Dari beberapa pengertian peran yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu konsep yang dimainkan oleh suatu pihak yang berhubungan dengan status dan kedudukan sosial serta melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan statusnya. Jika dihubungkan dengan peran dalam dispendag maka peran adalah tugas, fungsi dan wewenang suatu lembaga yang dimainkan sesuai dengan kedudukan tertentu.

2.1.2 Pengertian Pengawasan

Dalam bahasa Indonesia asal kata pengawasan adalah “awas” yang maknanya mengajak agar seseorang atau sekelompok orang untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan sehingga tidak terjadi kesalahan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang jika diartikan adalah pengawasan dan pengendalian, dikalangan ahli atau sarjana pengertian *controlling* ini disamakan dengan pengawasan (Makmur, 2017). Pengawasan di definisikan suatu proses kegiatan yang tersusun oleh manajemen agar bisa melakukan penilaian kinerja berdasarkan yang telah ditetapkan, rencana, tujuan yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah kinerja telah sesuai dengan standar tersebut dan melakukan evaluasi yang diperlukan guna melihat sumber daya manusia yang digunakan apakah sudah dengan seefektif mungkin dan seefisiensi mungkin untuk tercapainya tujuan.

Sondang P. Siagian (Makmur, 2017) menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pemeriksaan pelaksanaan seluruh kegiatan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Victor M. Situmorang (Makmur, 2017) pengawasan adalah setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dalam untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan apakah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari Pengawasan adalah suatu usaha yang tersusun secara sistematis untuk menetapkan penilaian terhadap standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik dan melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan dari

aktivitas yang dilaksanakan dengan ketentuan yang ada. Pengawasan dapat di klasifikasikan berdasarkan hal berikut Mukarom & Laksana (Mukarom & Laksana, 2015) :

1 Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yaitu apabila dalam sebuah badan atau lembaga seorang pemimpin dari sekelompok orang atau instansi melakukan sendiri pemantauan terhadap pelaksanaan yang sedang berlangsung oleh para karyawannya. Pengawasan langsung terbagi menjadi:

a. Inspeksi langsung.

Inspeksi langsung yaitu apabila pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh pimpinan dalam suatu instansi atau organisasi.

b. The-spot observation (Pengamatan Tempat).

Pengawasan the-spot observation adalah suatu proses koreksi atau pengamatan suatu tempat operasional yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Disperindag Kota Batam terhadap gudang-gudang tempat distributor menyimpan stok persediaan kebutuhan bahan pokok.

c. On-the-spot report (Laporan Tempat).

On the spot report adalah pengaduan-pengaduan dari distributor yang diterima langsung oleh Disperindag. pengaduan tersebut diterima tersebut berupa laporan jumlah ketersediaan stok bahan pokok.

2 Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan atau penilaian yang dilakukan dengan cara menerima laporan-laporan yang diberikan oleh pelaksana kegiatan kemudian dipelajari, laporan tersebut dapat berbentuk tertulis ataupun lisan, mempelajari pendapat masyarakat dan tanpa melakukan pengawasan langsung atau datang ke tempat pelaksanaan kegiatan. Di mana suatu organisasi perlu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan karyawan untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi karyawan ditempat kerja dan menerima laporan-laporan dari para bawahan. Menurut Stephen Robein dalam (Syafie, 2011) Pengawasan dapat artikan sebagai proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai rencana dan untuk mengoreksi setiap pembangunan yang signifikan. Menurut George. R Tery dalam (Mukarom & Laksana, 2015) mengartikan pengawasan sebagai penilaian terhadap kegiatan yang telah di laksanakan, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut Robin dalam (Mukarom & Laksana, 2015) merupakan suatu pelaksanaan yang memerlukan seorang yang dapat memenejerial untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dari sebuah organisasi yang sangat mendasar. Pengawasan menurut para ahli adalah sebagaimana yang diungkapkan diatas, maka pengawasan dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan membandingkan atau mengoreksi antara apa yang telah dikerjakan sebelumnya dengan hasil yang didapat apakah kenyataan telah sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan pengukuran terhadap penyimpangan serta melakukan evaluasi. karena dinilai sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan target yang telah direncanakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengawasan harus melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sehingga fokus perhatian saat ini adalah Peran dari Disperindag Kota Batam dalam mengawasi kelancaran distribusi bahan pokok yang kenyataannya dilakukan oleh pemerintah dan diterapkan.

2.1.3 Indikator Pengawasan

Robbins and Coulter dalam Satriadi (Robbins & Coulter, 2016) mengatakan bahwa terdapat empat indikator dari pengawasan yaitu:

- 1 Menetapkan standar (Standards) yaitu menetapkan target atau keinginan, dan melakukan perbandingan dari hasil yang didapat dalam melakukan kegiatan dari suatu organisasi yang telah dilaksanakan. standar adalah suatu batasan patokan pencapaian mengenai hal apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dalam memjalankan proses aktivitas agar tercapainya ketetapan yang telah ditentukan.
- 2 Pengukuran (Measurement) yakni suatu proses kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berulang-ulang baik dilakukan dalam harian, mingguan, atau bulanan sehingga antara mutu dan hasil yang didapat bisa di ukur.
- 3 Membandingkan (Compare) adalah suatu kegiatan membandingkan suatu performa dengan pencapaian yang didapat dengan rencana yang telah

ditetapkan di awal, apakah ada peningkatan atau lebih rendah atau sama dengan standar.

- 4 Melakukan tindakan (Action) adalah suatu kecurusan untuk mengambil suatu tindakan guna perbaikan. Apabila terjadi penyimpangan antara standar yang telah ditetapkan dengan realisasi maka perlu melakukan follow-up untuk perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.

Selain itu terdapat indikator pengawasan menurut Kartono dalam jufrizen (2016 : 112) yaitu sebagai berikut:

- 1 Menentukan ukuran pelaksanaan. Yang dimaksud dengan menentukan ukuran pelaksanaan adalah tahapan-tahapan untuk melakukan pengukuran dari kegiatan seperti kontinu atau minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu tertentu misalnya seperti satu kali dalam seminggu, satu kali dalam satu hari, satu kali dalam satu jam.
- 2 Memberikan penilaian. Artinya memberi pendapat kepada para bawahan terhadap apa yang telah dikerjakan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak sesuai.
- 3 Mengadakan korektif. mengadakan korektif melakukan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi sehingga terlalu sulit untuk dicapai, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan yang melakukan pelanggaran.

Dari beberapa indikator pengawasan yang dijelaskan di atas, peneliti menggunakan indikator dari Robbins and Coulter dalam Satriadi (Robbins &

Coulter, 2016) dikarenakan indikator tersebut sesuai dan relevan digunakan untuk penelitian ini.

2.1.4 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Oleh karena itu pengawasan di perlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah (Asiyah, 2018):

- 1 Mengetahui proses pengerjaan, lancar atau tidaknya.
- 2 Memperbaiki kesalahan staf dan mengambil tindakan agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi ketika ada kesalahan baru muncul.
- 3 Menentukan apakah anggaran belanja yang termasuk dalam rencana sudah objektif atau tidak.
- 4 Mengetahui kinerja dari pelaksana dalam mengerjakan tugas apakah sesuai dengan rencana (bagian dari proyek)
- 5 Untuk menentukan hasil pekerjaan jika dikaitkan dengan rencana yang disesuaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pengawasan adalah :

- 1 Membandingkan antara hasil dari kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan.

- 2 Untuk mengetahui masalah, kelemahan, atau kegagalan serta kekurangan dari rencana yang telah ditetapkan agar dapat melakukan pekerjaan dengan benar.
- 3 Untuk mencari jalan keluar apabila ada masalah, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut dengan tindakan korektif.

2.1.5 Langkah Pengawasan

Maman Ukas (2018: 151) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang terdapat dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut (Busro, 2018):

- 1 Ukuran - ukuran yang menyediakan standar yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum atau signifikan, tetapi selama seorang masih berpikir bahwa hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
- 2 Perbandingan antara hasil actual dengan yang telah direncanakan. Ulasan ini harus di ungkapkan ke publik yang dapat berbuat sesuatu tentang hal ini.
- 3 Tindakan korektif yang bersih. Artinya dimana aturan tersebut tidak ada artinya tanpa pembenaran, asalkan dalam hal ini diketahui bahwa kejadian biasa tidak mengarah pada hasil yang diinginkan.

Selanjutnya Saragih menyatakan bahwa, untuk dapat melaksanakan pengawasan dengan baik, maka pimpinan harus mengetahui langkah-langkah proses pengawasan yaitu :

- 1 Menetapkan tolok ukur yang diperlukan untuk dapat mengevaluasi dan menilai apakah kegiatan yang berlangsung telah sesuai ketentuan, aturan dan regulasi. Tolok ukur tersebut adalah manfaat atau pedoman hukum yang dapat berupa : Undang-undang, PP, Keppres, Inpres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala daerah atau petunjuk pelaksanaan/teknis yang telah ditetapkan pemerintah dan masih berlaku.
- 2 Menetapkan metode, waktu dan kuantitas yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Metode yang digunakan biasanya berupa observasi dan pengumpulan data secara langsung, sedangkan waktu dan kuantitasnya dapat ditentukan tergantung dari tahapan peristiwa (pertama, tengah dan terakhir) atau secara tidak sengaja jika diperlukan, dan jika peristiwa tersebut terjadi, dalam waktu satu tahun, jadi itu bisa dilakukan tiga perempat atau per semester.
- 3 Pengukuran dan perbandingan, yaitu kegiatan evaluasi hasil yang telah diperoleh apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya oleh indikator yang dapat diamati secara merata dan cerdas.
- 4 Tindak lanjut, yaitu merupakan upaya untuk memperbaiki evaluasi yang dapat berupa penyesuaian rencana, perubahan rencana, pengarahan, pemberian penghargaan atau sanksi.

Hal tersebut diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan-pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry bahwa : pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yakni :

- 1 Mengukur hasil pekerjaan
- 2 Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan), dan
- 3 Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

2.1.6 Faktor Penghambat Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Proses pengawasan terhadap kelancaran distribusi bahan pokok di Kota Batam yang dilakukan oleh Disperindag walaupun telah berpedoman pada regulasi yang ada , tetapi dalam pelaksanaannya Disperindag mengalami beberapa faktor masalah yang menghambat. Ditemukan faktor-faktor penghambat proses pengawasan terhadap kelancaran distribusi bahan pokok adalah :

1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personel merupakan pendayagunaan sumber daya manusia dalam organisasi mencapai tujuan yang telah disepakati termasuk dalam manajemen. Menurut Simamora pelibatan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan merupakan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan dan mendayagunakan sumber manusia dengan baik pada setiap organisasi merupakan manajemen sumber daya manusia yang harus diterapkan untuk tercapainya tujuan. Pada hakekatnya, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan gerakan pengakuan terhadap tingginya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat dominan dalam suatu

organisasi. Usaha yang digunakan guna meraih keberhasilan dengan cara pemanfaatan potensi sumber manusia yang gunanya mencapai tujuan dari organisasi, meliputi waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia. (Marjuni, 2015)

Penempatan orang-orang yang tepat untuk ditugaskan pada posisi yang tepat melalui prosedur yang berkelanjutan dalam organisasi sangat penting untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Aset utama yang harus dikelola adalah manajemen sumber daya manusia karena mereka yang akan melakukan tugas yang telah ditetapkan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui penerapan pada manajemen maupun fungsi operasional.

2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana secara umum merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat, atau barang saja tetapi juga bisa suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. dalam pengadaannya sarana dan prasarana Bisa dengan cara membeli, membuatnya sendiri ataupun menerima bantuan dari orang lain lain. Sementara bahwa penggunaannya sarana dan prasarana digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tercapainya tujuan. Sarana dan prasarana dalam penggunaannya tentu harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut akan tercapainya tujuan, karakteristik penggunaannya, hingga adanya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang.

3 Cuaca dan Iklim

Cuaca dan iklim sangat berpengaruh bagi produksi pangan di Indonesia. Iklim berkaitan erat dengan cuaca dan pemanasan global yang dapat mempengaruhi aktivitas dan produksi komoditas di suatu wilayah. Perubahan iklim ditandai dengan adanya fenomena cuaca yang berubah-ubah dan tidak menentu. Perubahan iklim terjadi akibat perbedaan pada salah iklim seperti suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara terus menerus dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, perubahan suhu udara yang begitu ekstrim dan arah angin yang berubah drastic, serta berkurangnya intensitas hujan merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim.

Cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Cuaca bias saja hanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat misalnya hanya beberapa jam yang menyebabkan terciptanya perbedaan cuaca antara wilayah satu dengan wilayah lainnya yaitu perubahan suhu dan kelembaban yang dilatarbelakangi oleh sudut pemanasan matahari dikarenakan perbedaan lintang bumi. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama.

2.1.7 Jenis Bahan Pokok

Bahan pokok adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdiri untuk keperluan sehari-hari atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no 115/mpp/kep/2/1998

tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan pokok itu adalah beras, sagu dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beryodium dan bernatrium. Berikut jenis-jenis sembako untuk kebutuhan sehari-hari :

1 Beras, Sagu, atau Jagung

Beras adalah makanan pokok dan sumber energi bagi masyarakat Indonesia. Karena beras memiliki sumber nutrisi dan energi yang lebih baik dibandingkan dengan makanan biji-bijian lainnya. Sagu juga merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia Timur. Karena di dalam sagu, terdapat banyak karbohidrat. Sedangkan biji jagung kaya akan karbohidrat. Selain itu dalam perkembangannya jagung hanya membutuhkan lebih sedikit air bila dibandingkan dengan pengembangan padi. Oleh karena itu, jagung banyak digunakan untuk pengganti makanan pokok di daerah yang kering.

2 Gula Pasir

Gula pasir juga merupakan bahan pokok yang dibutuhkan karena memiliki banyak kegunaan. gula pasir memberi rasa manis pada hidangan. Gula pasir atau gula putih menjadi bahan pokok dalam berbagai pembuatan jenis makanan seperti kue, manisan, biskuit atau minuman lainnya. Gula pasir sering digunakan sebagai olahan untuk makanan dan minuman karena akan memberikan rasa manis terhadap makanan atau minuman. Gula pasir juga merupakan bahan pokok yang dibutuhkan karena memiliki banyak kegunaan. Gula putih ini berasal dari tebu dan juga tanaman bit atau umbi-umbian.

3 Sayur-sayuran dan Buah-buahan

Siapa yang tak mengenal kedua bahan pokok ini? Pasti semua mengetahuinya, dengan jelas semua orang tahu manfaat sayur dan buah sangat baik bagi tubuh. Keduanya juga masuk ke dalam makanan empat sehat lima sempurna, sebagai pemenuh serat dan vitamin bagi tubuh. Secara umum, sayur dan buah merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan bagi tubuh. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan 400 g sayur dan buah per hari, tepatnya 250 g sayur atau setara dengan 2,5 porsi, serta 150 g buah atau setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang, 1½ pepaya ukuran sedang, atau 3 buah jeruk ukuran sedang.

4 Daging Sapi, Ayam, dan Ikan

Daging sapi, ayam dan ikan merupakan sumber protein bagi tubuh. Protein dalam daging hewan sangat penting bagi kesehatan manusia. Ini karena jutaan sel dalam tubuh manusia dapat berfungsi karena jumlah protein yang sempurna dan itulah yang memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitasnya dengan optimal.

Sedangkan daging ayam memiliki kandungan nutrisi seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, Vitamin A, D, E, B5, B12, dan K, dan rendah kolesterol. Di dalam daging ikan memiliki nutrisi seperti protein, lemak esensial, Vitamin A, D, E, B6, dan B12, zat besi, seng, zink, selenium, yodium, dan rendah kolesterol.

5 Minyak Goreng dan Margarin

Minyak goreng digunakan untuk menggoreng suatu hidangan. Minyak goreng sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan margarin, juga bisa digunakan untuk pembuatan kue.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian terhadap pengawasan distribusi bahan pokok sebelumnya diantaranya :

- 1 Jurnal yang dilakukan oleh Yohanes Roni, dan Dodi Setyawan yang berjudul Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi sudah berperan dengan cukup baik dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Karena Dinas Koperasi tersebut dalam melakukan pengawasan berpedoman pada 3 tahap yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, dan melakukan perbaikan. Kemudian dalam melakukan pengawasan, Dinas Koperasi juga di dukung oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Batu dan terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya (Roni & Setyawan, 2020)
- 2 Jurnal internasional dengan judul Peran Panwaslu Kota Tangerang dalam Pengawasan Pemilihan kepada Daerah Provinsi Banten 2017 dalam International Journal of Demos yang terbit pada Desember 2020, Volume 2 Issue 3 oleh M. Dzaki Aziz dan Moh. Rizky Godjali dari program studi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka di simpulkan bahwa peran panwaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten 2017 telah pmelakukan tugasnya sesuai Peraturan perundang- undangan, namun masih terdapat kendala. Kurangnya antisipasi sehingga masih terdapat kejanggalan saat melakukan perhitungan suara. Tidak adanya petunjuk untuk tingkat bawah jika ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih pada saat pelaksanaan pilkada. Tidak ada aturan tegas mengenai sanksi bagi yang melanggar. Dan tidak adanya aturan tegas mengenai larangan menggunakan fasilitas pemerintah/negara untuk tujuan kampanye. (Aziz, dan Godjali, 2020)

3. Jurnal yang ditulis oleh Bagus Wicaksana dengan judul analisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (studi kasus : Kota Makassar) dengan Volume 10/No.1/2014. Metode yang digunakan adalah *Regulatory Impact Assessment* (RIA) karena metode ini merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis berbagai aspek dalam penetapan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Permendag tersebut perlu direvisi dan disempurnakan sehingga pelaksanaannya bisa

lebih efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan B2, khususnya yang terkait dengan bahan pangan (Wicaksana, 2014)

4. Jurnal yang ditulis oleh Junaedi Saragi, Irwan Nasution & Walid Musthafa dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai yang dimuat dalam Jurnal dengan ISSN 2085 – 0328 dengan Vol 6 No. 1 2017. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Marihat Dolok sudah baik. dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa. pertama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya dalam mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Marihat Dolok juga transparan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa selama ini sudah berjalan dengan baik yaitu meninjau kembali setiap keputusan yang dibuat oleh kepala desa. (Saragi, Junaedi et al. 2019).
5. Jurnal Ilmu Hukum dengan Volume 6 No. 1 Januari - April 2012, dengan ISSN 1978-5186 yang ditulis oleh Ati Yuniati dari Bagian Hukum

Administrasi dengan judul penelitian yaitu Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang telah melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang dilakukan Dinas Tata Kota Bandar Lampung pada saat ini sudah cukup baik dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Tata Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Bandar Lampung (Yuniati, 2012).

- 6 Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Pivit Septiary Chandra, Tuti Khairani Harahap, dan Meyzi Heriyanto dengan judul Evaluasi Pengawasan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya oleh Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau dalam jurnal Sorot Vol. 11 No. 2, Oktober 2016 – 101 – 110. Peneliti menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat di tarik kesimpulan bahwa evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag terhadap depot air minum di Kecamatan Tampan masih belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan. Kendalanya yaitu kurangnya sarana dan prasarana, tidak lengkap nya data yang diperoleh, lemahnya kontribusi

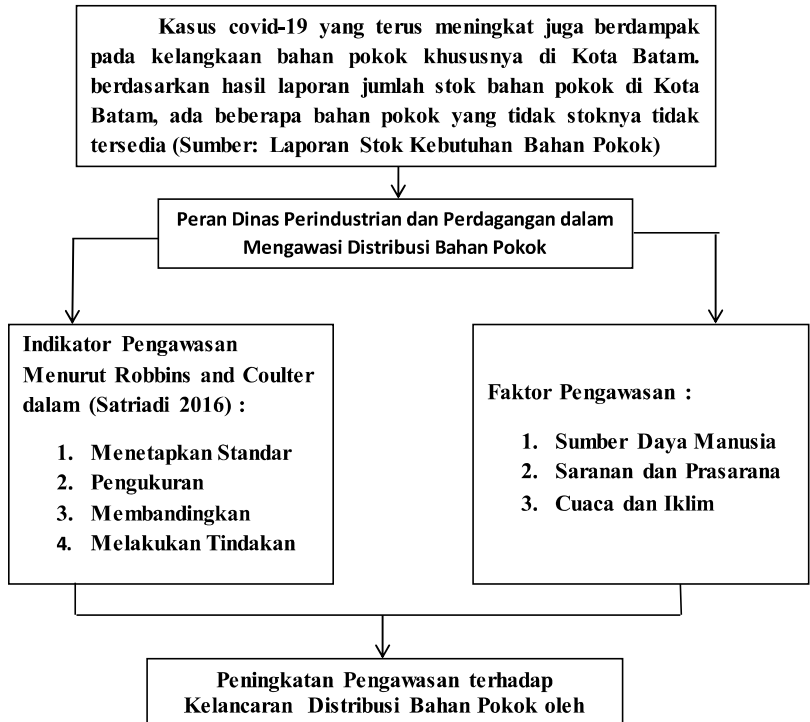
masyarakat terhadap implementasi kebijakan dan belum terciptanya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah. (Chandra Pivit Septiary et al, 2016)

- 7 Jurnal yang ditulis oleh Adriansyah dan Ahmad Tarmizi Yussa yang berjudul Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) dengan PUBLIKa, Vol 3, No 1 hal 1-12 (2017). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data dengan cara berinteraksi dan bertatap muka langsung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh seksi Perdagangan pada Disperindag di Kota pekanbaru. Indikator yang digunakan ada dua yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Sebaiknya Disperindag Kota Pekanbaru lebih menekankan kepada penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan dilapangan. Karena berdasarkan hasil observasi peneliti merasa sumber daya yang ada di Disperindag masih kurang mendukung untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh ke semua tempat yang menjual minuman beralkohol (Adriansyah & Yussa, 2017).
- 8 Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Raja Yqhsyah dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Batam dari Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Dengan JOM FISIP Vol. 3 No.2 – Oktober 2016. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pertama pengawasan oleh Departemen Perdagangan dan Industri adalah sudah cukup optimal. Kedua, masih banyak peredaran ilegal alkoholnya minuman yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Ketiga, kurangnya publik pendidikan dan penjual minuman beralkohol. Keempat, pemahaman dan publiknya masih kurang kesadaran akan peredaran minuman beralkohol (Yqhsyah, 2016).

- 9 Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Thoriz Aziz dan Khoiril Huda dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon. Dari universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Vol. 2 Issue 3, Desember 2020. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan oleh lingkungan hidup masih terdapat faktor penghambat berupa anggaran yang tidak memadai, hal itu dikarenakan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengawasan menggunakan alat untuk pengukur udara yang harganya mencapai 5 miliar. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, Dinas lingkungan hidup dalam menjalankan pengawasan tidak memiliki laboratorium untuk pencemaran lingkungan hidup (Aziz & Huda, 2020).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
(Sumber: Hasil Observasi Penelitian)